

## DETERMINAN MANAJEMEN LABA DALAM PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN

Santoso Suando  
Toto Warsoko Pikir \*  
Lodovicus Lasdi

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

\*[toto@ukwms.ac.id](mailto:toto@ukwms.ac.id)

### ARTICLE INFO

Article history:

Received April 17 2013

Revised May 13, 2013

Accepted June 8, 2013

### Key words:

*Discretionary Accrual, Manajemen Laba, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, Non Insentif Pajak*

### ABSTRACT

In 2008, the Indonesian Directorate General of Tax Law changes the Income Tax Law. They have been issued the Law Division 36 of 2008 on Income Tax. Corporate income tax rates changes from progressive rates to single rate, which 28% were effected in 2009 and 25% were effected in 2010. The purpose of this research is to examine and analyze whether changes in corporate income tax rates in Indonesia responded to earnings management by comparing the level of discretionary accruals in the period before and after the enactment of Law Division 36 of 2008. Another purpose of this research is to test whether tax incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax incentives (earnings pressure, level of debt, firm size, and managerial ownership) affect earnings management. This research is quantitative research with the object of research is manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange from 2006 to 2011. Data obtained from the publication of the audited financial report or annual report and ICMD. Sampling in this research is purposive sampling. Data analysis techniques used in this research are different test and multiple linear regression analysis. The results showed that there is no management responded by conducting earnings management when corporate income tax rates in Indonesia has changed. Regression results indicate that tax incentives (tax planning and net deferred tax liabilities) and non-tax incentives (earnings pressure, the level of debt and managerial ownership) have a significant effect on earnings management. For firm size had no significant effect on earnings management.

### ABSTRAK

Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, dimana 28% yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Tujuan lain dari penelitian ini yaitu untuk menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2006 hingga tahun 2011. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan auditan atau laporan tahunan dan ICMD. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon oleh manajemen dengan melakukan manajemen laba. Hasil regresi menunjukkan bahwa insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

### PENDAHULUAN

Kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya akan digambarkan melalui adanya laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat akan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu contoh pengguna laporan keuangan adalah investor. Sebagai penanam modal, para investor dapat memprediksi laba di

masa yang akan datang ataupun menaksir risiko investasi melalui laporan keuangan, sehingga para investor dapat menentukan apakah investor harus membeli, menahan, ataupun menjual investasi tersebut. Agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi setiap penggunaannya, laporan keuangan tersebut harus memenuhi tujuan, aturan serta prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku umum (Rahmawati, 2010).

Salah satu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah laba. Pertanyaan mendasar yang timbul adalah apakah manajemen telah menyajikan laba dengan benar dengan tidak melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat terjadi karena adanya kebebasan penggunaan metode dan estimasi akuntansi. Setiap tahunnya perusahaan diwajibkan membayar pajak dari penghasilan yang mereka dapat. Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, pemilik perusahaan diduga akan cenderung meminta manajemen perusahaan melakukan manajemen laba ataupun tindakan pajak agresif (Chen et al, 2010; dalam Sari dan Martani, 2010). Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong tax avoidance atau tergolong tax evasion (Frank et al, 2009; dalam Sari dan Martani, 2010). Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara memanfaatkan celah-celah atau kelemahan peraturan perpajakan tetapi masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga hal ini masih dapat dibenarkan. Tax evasion atau penggelapan pajak adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009. Perubahan dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Sebelum tahun 2009 tarif pajak Penghasilan Badan di Indonesia adalah tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberi banyak keuntungan bagi banyak pengusaha karena dengan berlakunya peraturan ini maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan badan berubah menjadi 28% yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010. Bagi perusahaan yang telah go public memiliki tarif lebih rendah 5% yaitu sebesar 23% dengan syarat minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang diperdagangkan dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak.

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984, UU PPh tahun 1994 yang berlaku pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010. Perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentunya sangat menguntungkan perusahaan khususnya yang telah go public karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Bagi perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya penurunan tarif ini dapat dijadikan momen yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak penghasilannya. Tindakan manajemen laba dapat terjadi karena didasari oleh perilaku opportunistik dari manajer. Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk melakukan manajemen laba atas penurunan tarif pajak ini adalah tax shifting yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum penurunan ke laba sesudah penurunan tarif pajak. Menurut akuntansi penundaan pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya merupakan hal yang dapat diterima karena akuntansi menganut prinsip accrual basis, sehingga pengakuan pendapatan dan beban dapat terjadi tanpa memperhatikan waktu penerimaan maupun pengeluaran kas dari pendapatan/biaya yang bersangkutan (Wijaya dan Martani, 2011).

Hidayati dan Zulaikha (2003) meneliti apakah perubahan UU PPh tahun 1994 menjadi UU PPh

tahun 2000 direspon oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa discretionary accrual. Dalam mendeteksi adanya manajemen laba, Hidayati dan Zulaikha (2003) menggunakan pendekatan discretionary accrual. Penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) memberikan bukti bahwa perubahan Undang-Undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 yang mengubah tarif dan lapisan penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak Badan tidak direspon oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa discretionary accrual guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Menurut Subagyo dan Oktavia (2010) kelemahan dari penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) terletak pada metodologi penelitiannya, karena peneliti hanya menggunakan uji beda dalam mendeteksi manajemen laba. Keterbatasan penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) adalah jumlah sampel yang digunakan sangat kurang yaitu hanya 25 perusahaan dari total 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Subagyo dan Oktavia (2010) melakukan penyempurnaan atas penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2001) serta Hidayati dan Zulaikha (2003).

Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan bukti bahwa perusahaan manufaktur yang melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia adalah perusahaan yang memperoleh laba. Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian tidak melakukan manajemen laba dalam rangka merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, karena sesuai peraturan pajak yang ditetapkan bagi perusahaan yang mengalami kerugian tidak dikenakan pajak dan perusahaan tersebut memperoleh fasilitas kompensasi kerugian dari Pemerintah.

Menurut Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merespon perubahan tarif pajak turut dipengaruhi oleh insentif pajak dan non insentif pajak. Variabel insentif pajak dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) yaitu perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka akan mendapatkan keuntungan dari tax shields dan dapat meminimalisasi beban pajak perusahaan. Variabel non insentif pajak dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah earnings pressure, tingkat utang, earnings bath, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Bagi perusahaan yang labanya telah mencapai target, penurunan laba dapat dilakukan dengan earnings pressure. Earnings pressure dilakukan dengan menurunkan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil. Penurunan laba juga dapat dilakukan dengan meningkatkan utang karena dengan meningkatkan utang maka beban bunga akan semakin besar. Earnings bath yang dimaksud dalam penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) adalah taking a bath yang merupakan salah satu pola dari manajemen laba. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai, oleh karena itu perusahaan dapat mengatur kegiatan mereka untuk mencapai target yang mereka inginkan misalnya untuk penghematan pajak. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan tersebut, ketika terdapat kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan maka manajer akan melakukan manajemen laba karena pemilik cenderung menginginkan perusahaan memiliki beban pajak yang kecil.

Subagyo dan Oktavia (2010) menguji pengaruh insentif pajak dan non insentif pajak terhadap manajemen laba. Penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak, dan non insentif pajak yaitu earnings pressure. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian, manajemen laba dipengaruhi oleh non insentif pajak yaitu earnings pressure. Subagyo dan Oktavia (2010) memberikan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan sampel ternyata tidak dipengaruhi oleh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu hanya meneliti sampel perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Keterbatasan yang kedua adalah penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif pendek, yaitu 2008 dan 2009 saja. Keterbatasan ketiga adalah hanya menggunakan satu variabel pengukuran insentif pajak saja yaitu perencanaan pajak.

Wijaya dan Martani (2011) melakukan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Subagyo dan Oktavia (2010). Wijaya dan Martani (2011) menambahkan variabel insentif pajak lain, yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih (net deferred tax liability). Menurut Yulianti (2005, dalam Wijaya dan Martani, 2011) faktor ini dianggap dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan

manajemen laba guna menghindari kerugian karena ketika kewajiban pajak tangguhan meningkat berarti perusahaan diharuskan membayar beban pajak yang lebih tinggi. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) memberikan bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Hal ini berarti bukan hanya perusahaan yang memperoleh laba yang memanipulasi labanya, tetapi juga perusahaan yang mengalami kerugian. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) juga memberikan bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih, dan non insentif pajak yaitu earnings pressure. Bagi perusahaan yang mengalami kerugian, manajemen laba dipengaruhi oleh insentif pajak yaitu kewajiban pajak tangguhan bersih dan non insentif pajak yaitu earnings pressure. Selain itu, ditemukan pula bukti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan sampel (baik perusahaan yang memperoleh laba atau mengalami kerugian) ternyata tidak dipengaruhi oleh persentase jumlah saham disetor perusahaan yang diperdagangkan di BEI. Penelitian Wijaya dan Martani (2011) memiliki beberapa keterbatasan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu penelitian Wijaya dan Martani (2011) menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif pendek, yaitu satu tahun sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (tahun 2008 dan 2009). Keterbatasan kedua yaitu faktor yang diteliti tidak memasukkan industri keuangan khususnya bank.

Fitriyani, Maiyarni, dan Gowon (2012) kemudian melakukan replikasi dan pengembangan penelitian Setiawati (2001) dan Wulandari, dkk. (2004) untuk mendapatkan bukti empiris mengenai praktik manajemen laba melalui manipulasi aktivitas akrual sebelum dan sesudah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian Fitriyani, dkk. (2012) memberikan bukti bahwa ada perbedaan manajemen laba ditunjukkan dengan nilai discretionary accrual, pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Discretionary accrual pada periode sesudah pemberlakuan lebih tinggi daripada periode sebelum, artinya perusahaan merespon perubahan tarif pajak penghasilan dengan cara melakukan manajemen laba. Fitriyani, dkk. (2012) menyarankan untuk memperluas jenis perusahaan yang akan diteliti, tidak hanya terfokus pada perusahaan manufaktur saja.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Beberapa keterbatasan penelitian terdahulu membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti kembali. Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dan Wijaya dan Martani (2011) untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan laba dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini juga akan menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan manajemen laba yang relatif lebih panjang yaitu tahun 2007 hingga 2011. Tahun 2007 dipilih karena untuk menguji apakah sebelum adanya perubahan UU PPh 2008 perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba. Tahun 2010 dipilih karena pada tahun tersebut diefektifkan pula tarif pajak yang lebih rendah, dan untuk tahun 2011 dipilih karena untuk menguji apakah perusahaan sampel tetap melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?; (2) Apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) berpengaruh terhadap manajemen laba?; dan (3) Apakah non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba? Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat discretionary accrual pada periode sebelum dan sesudah berlakunya



Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan; (2) Untuk menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) berpengaruh terhadap manajemen laba dan (3) Untuk menguji apakah non insentif pajak (earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba.

## KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Kajian Literatur

#### *Teori Keagenan (Agency Theory)*

Timbulnya praktek manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan (agency theory). Sunarto (2009) menggambarkan teori keagenan merupakan perbedaan kepentingan yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Teori keagenan ini timbul ketika pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan sendiri, sehingga pemilik harus melakukan kontrak dengan para manajer untuk menjalankan perusahaan, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan menerima kompensasi sesuai dengan kontrak.

Eisenhardt (1989, dalam Isnanta, 2008) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia untuk menjelaskan teori keagenan, yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, pemilik dan manajemen kemungkinan besar akan mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Hal tersebut akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Pihak pemilik termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2004; dalam Isnanta, 2008).

Perbedaan kepentingan pemilik dengan manajer menyebabkan perlunya kontrak kerja antara pemilik dengan manajer untuk mencapai manfaat bersama (Sunarto, 2009). Kontrak yang baik antara pemilik dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam melakukan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan pembagian return antara pemilik dan manajer. Kinerja suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya akan digambarkan melalui adanya laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan tanggungjawab manajer kepada pemilik. Masalah yang kemudian timbul dalam teori keagenan adalah pemilik tidak memiliki informasi yang cukup terhadap kinerja manajer, sedangkan manajer memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi (asymetry information). Menurut Scott (2012) terdapat dua tipe asimetri informasi, yaitu:

- a. Adverse selection adalah tipe asimetri informasi dimana para manajer serta pihak internal perusahaan lainnya mempunyai informasi lebih atas yang lain. Adverse selection dapat terjadi karena para manajer dan pihak internal perusahaan lainnya lebih mengetahui kondisi saat ini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor. Informasi yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan kepada pemegang saham.
- b. Moral hazard adalah suatu tipe asimetri informasi dimana para manajer serta pihak internal perusahaan lainnya dapat mengamati kegiatan-kegiatan mereka secara penuh dibandingkan dengan pihak lain. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian, sehingga pemilik tidak dapat mengamati seluruh aksi manajer yang mungkin melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Berdasarkan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri

sendiri, maka dengan asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer akan mendorong manajer menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada pemilik, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Tindakan yang dilakukan manajer yaitu dengan mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba (Richardson, 1998; dalam Wardani dan Masodah, 2011).

#### *Laporan keuangan*

Laporan keuangan adalah sebuah sarana pengkomunikasian informasi yang dibuat oleh manajemen sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemilik atas tugas yang diberikan oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan, serta sebagai sarana pengkomunikasian informasi kepada pihak-pihak di luar perusahaan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf 10 (2012), "tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.". Menurut IAI dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf ke 9 (2012), laporan keuangan akan memenuhi kebutuhan informasi pengguna yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Investor. Sebagai penanam modal, para investor berkepentingan terhadap risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Selain itu para pemegang saham juga tertarik pada informasi yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
- b. Karyawan. Karyawan tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan yang memungkinkan mereka untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja.
- c. Pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman beserta bunganya pada saat jatuh tempo.
- d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha ini berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman.
- e. Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang atau bergantung pada perusahaan.
- f. Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas perusahaan. Mereka membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional, dan statistik lainnya.
- g. Masyarakat. Perusahaan dapat memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara seperti memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, jumlah orang yang dipekerjakan, dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Oleh karena itu, laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi dan perkembangan kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

Setiap perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba. Harahap (2005:263, dalam Melinda, 2010) berpendapat laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan, antara lain: laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.

Laba diperoleh dengan menyelisihkan pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi

selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapat tersebut. Dengan melihat laba ataupun rugi kinerja perusahaan dapat dinilai. Perusahaan dengan laba yang rendah biasanya dianggap kinerjanya kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak, antara lain investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwa et al, 1994; Guenther, 1994; Maydew, 1997; dalam Hidayati dan Zulaikha, 2003).

#### *Manajemen Laba*

Sari dan Bandi (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun berbasis akrual memberikan keunggulan, karena informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya mempunyai indikasi yang lebih baik daripada laporan keuangan yang disusun dengan berbasis kas. Dalam pelaksanaannya, PSAK memberikan fleksibilitas dan kebebasan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan laba. Fleksibilitas ini menimbulkan peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Gumanti (2000, dalam Sari dan Bandi, 2010) menyatakan bahwa manajemen laba muncul sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat laporan keuangan untuk melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya laba, demi kepentingan dirinya atau pihak lain. Scott (2012) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi atau tindakan nyata untuk mempengaruhi laba perusahaan dengan maksud tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka.

Scott (2012) mengemukakan beberapa pola manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, antara lain:

- a. *Taking a Bath*. Manajer akan mengalihkan biaya-biaya pada periode yang akan datang ke periode sekarang. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di periode yang akan datang. Biasanya dilakukan jika perusahaan akan mengadakan pergantian CEO.
- b. *Income Minimization*. Manajer mencoba memperkecil laba karena motif politik atau motif penghematan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki laba yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis.
- c. *Income Maximization*. Manajer mencoba meningkatkan laba periode sekarang dengan cara memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang besar atau untuk menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang.
- d. *Income Smoothing*. Manajer memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah. Tujuannya agar laba terlihat mengalami pertumbuhan dengan stabil.

Teknik dan pola manajemen laba menurut Asyik (2000:23, dalam Ariani, 2010) dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: (1) manajer mengubah metode akuntansi dengan tujuan memperbesar atau memperkecil laba, (2) manajer mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi, dan (3) menggeser periode biaya atau pendapatan. Menurut Roychowdhury (2006, dalam Wulandari dan Ayu, 2010) manajemen laba dapat dilakukan dengan cara manipulasi akrual atau dengan memanipulasi aktivitas riil. Manipulasi akrual merupakan manipulasi laba dengan discretionary accrual yang tidak memiliki pengaruh terhadap aliran kas secara langsung. Manipulasi akrual dilakukan manajer pada akhir periode ketika telah diketahui laba yang diperoleh. Setelah mengetahui jumlah laba yang diperoleh, manajer dapat menentukan berapa besar manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. Manipulasi akrual dapat terdeteksi oleh auditor, investor ataupun pemerintah. Hal ini akan dapat berdampak pada harga saham perusahaan bahkan menyebabkan kebangkrutan ataupun kasus hukum.

Manipulasi aktivitas riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer melalui aktivitas perusahaan sehari-hari. Tujuannya yaitu untuk memenuhi target laba tertentu atau untuk menghindari kerugian. Manajer dapat melakukan manipulasi aktivitas riil kapan saja sepanjang periode akuntansi berjalan. Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam manipulasi aktivitas riil antara lain manajemen penjualan, produksi yang berlebihan, dan pengurangan biaya diskresi (Roychowdhury, 2006; dalam Wulandari dan Ayu, 2010).

### *Akrual*

Terdapat dua jenis basis pencatatan akuntansi yaitu basis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Dengan berbasis kas, pendapatan akan dicatat ketika perusahaan menerima kas dan beban akan dicatat ketika perusahaan mengeluarkan kas. Dengan berbasis akrual, setiap transaksi yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan akan dicatat pada periode di mana transaksi tersebut terjadi, bukan pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Akuntansi yang dicatat dengan berbasis akrual memberikan banyak keunggulan, seperti: adanya informasi yang tepat untuk menggambarkan pendapatan dan beban perusahaan, dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan dapat menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif seperti penghapusan piutang.

Dengan basis akrual akan menyediakan banyak keleluasaan bagi manajer dalam hal pengakuan pendapatan dan beban, hal ini dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba. Untuk menganalisis ada atau tidaknya manajemen laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan non discretionary accrual dan discretionary accrual. Laba akrual merupakan laba bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual. Non discretionary accrual merupakan pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Discretionary accrual merupakan pengakuan akrual laba yang bebas, tidak diatur, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen.

### *Pajak Secara Umum*

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib yang dipungut dari Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang dimaksud dengan badan pada Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat (3) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak memiliki fungsi sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Fungsi pajak antara lain sebagai berikut (Waluyo, 2010):

- a. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, fungsi ini biasa disebut dengan fungsi penerimaan (*budgetair*). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, fungsi ini biasa disebut dengan fungsi mengatur (*regulator*). Salah satu contoh fungsi mengatur adalah dengan adanya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk minuman keras sehingga minuman keras dapat ditekan. Demikian pula dengan barang-barang mewah lainnya.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini (Waluyo, 2010):

- a. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Official assessment system* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, (2) Wajib Pajak bersifat pasif, (3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.



- b. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### *Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*

Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia merevisi Undang-Undang Perpajakan yang meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU PPh, serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Revisi Undang-Undang ini menyebabkan adanya perubahan tarif pajak. Perubahan tarif pajak penghasilan badan memberi banyak keuntungan bagi banyak perusahaan karena dengan berlakunya peraturan ini maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Jika pada tarif progresif, semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Pada tarif tunggal, berapapun besar laba yang dihasilkan tarif pajak yang dikenakan tetap sama. Perusahaan yang telah go public juga diuntungkan karena memiliki tarif lebih rendah 5% dengan syarat minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham yang perdagangkan dimiliki paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak. Perubahan UU PPh telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku pada tahun 1984, UU PPh tahun 1994 yang berlaku pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

#### *Insentif Pajak*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, insentif diartikan sebagai tambahan penghasilan (uang, barang, dsb.) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Dengan adanya insentif diharapkan para karyawan dapat bekerja sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Insentif pajak sendiri berarti bahwa suatu perangsang yang ditawarkan kepada Wajib Pajak, dengan harapan Wajib Pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Pada umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak menurut Spitz (1983, dalam Suandy 2008:16), yaitu:

- a. Pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) biasa disebut juga dengan pembebasan pajak (*tax holiday*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan.
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*) biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*).
- c. Pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*) biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau kegiatan bisnis tertentu.
- d. Penangguhan pajak (*tax deferment*) biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak.

Variabel insentif pajak dalam penelitian Wijaya dan Martani (2011) terdiri dari:

- a. Perencanaan Pajak

Dalam penelitian Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) proksi yang digunakan untuk mengukur insentif pajak adalah perencanaan pajak. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari tax shields dan dapat meminimalisasi beban pajak perusahaan (Yin dan Cheng, 2004; dalam Wijaya dan Martani, 2011).

- b. Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih Wijaya dan Martani (2011) menambahkan variabel insentif pajak berupa kewajiban pajak tangguhan bersih. Menurut Yulianti (2005, dalam Wijaya dan Martani, 2011) faktor kewajiban pajak tangguhan bersih dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Ketika kewajiban pajak tangguhan meningkat berarti semakin besar beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Kewajiban pajak tangguhan bersih meningkat ketika terdapat beda waktu yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Beda waktu terjadi karena terdapat

perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga berpengaruh pada laba akuntansi dan laba kena pajak akhirnya menjadi sama.

#### *Non Insentif Pajak*

Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh insentif pajak namun juga dipengaruhi oleh non insentif pajak. Non insentif pajak adalah insentif yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri guna meningkatkan produktifitas karyawan. Non insentif pajak yang diterapkan dalam tiap perusahaan akan berbeda. Insentif akan menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa non insentif pajak terdiri dari:

a. *Earnings Pressure*

Yin dan Cheng (2004, dalam Wijaya dan Martani, 2011) menyatakan bahwa jika perusahaan-perusahaan yang labanya telah mencapai target atau minimal sama dengan laba tahun lalu, maka penurunan laba perusahaan dapat dikurangi dengan *earnings pressure* guna melakukan perataan laba (*income smoothing*). *Earnings pressure* didefinisikan sebagai tindakan untuk melakukan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil (Yin dan Cheng, 2004; dalam Tiearya, 2012).

b. Tingkat Utang

Tingkat utang adalah besar kecilnya kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan pembayaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban dengan kewajiban lain, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Utang berbanding terbalik dengan laba, jika utang suatu perusahaan semakin besar maka laba akan semakin kecil karena semakin besarnya beban bunga. Terkait dengan pajak, semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan harus mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan dapat meningkatkan utang perusahaan untuk mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar, sehingga laba dapat berkurang akibat semakin besarnya beban perusahaan.

c. *Earnings Bath*

*Earnings bath* yang dimaksud oleh Yin dan Cheng (2004, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) adalah *taking a bath*, yang merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dapat dilakukan menurut Scott (2012:425). *Taking a bath* biasa dilakukan manajer pada saat perusahaan mengalami kondisi yang menurun atau sedang mengalami kerugian. Dalam melakukan manajemen laba, manajer akan mengalihkan biaya-biaya pada periode yang akan datang ke masa kini dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi kondisi buruk yang tidak menguntungkan dan tidak dapat dihindari pada periode berjalan. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa mendatang.

d. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian besar kecilnya sebuah perusahaan. Besar kecilnya sebuah perusahaan ditunjukkan oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Biasanya, semakin besar ukuran perusahaan maka laba yang dihasilkan juga akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Menurut Wijaya dan Martani (2011) perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Adanya pendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan lebih mungkin perusahaan tersebut mengurangi laba dengan menggeser atau menunda labanya ke tahun setelah diefektifkannya UU PPh tahun 2008, hal ini dilakukan agar pajak yang harus dibayar semakin kecil. Penelitian Scholes et al. (1992, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) memberikan bukti bahwa perusahaan besar cenderung menggeser laba kotornya. Hal

ini diperkuat penelitian Guenther (1994, dalam Subagyo dan Oktavia, 2010) yang memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi *discretionary accrual*.

e. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial akan dapat mensejajarkan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Ardilla (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham yang juga dirinya sendiri. Dengan adanya penurunan tarif pajak, pemilik diduga akan cenderung meminta manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, adanya kepemilikan manajerial akan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Pengembangan Hipotesis

*Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dengan Manajemen Laba*

Pada tahun 2008, Direktorat Jendral Pajak Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009 dan 2010. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberi banyak keuntungan bagi banyak perusahaan karena dengan berlakunya peraturan ini maka tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan berubah menjadi 28% yang diefektifkan pada tahun 2009 dan 25% yang diefektifkan pada tahun 2010 untuk perusahaan. Adanya tambahan insentif sebesar 5% bagi perusahaan yang telah *go public*.

Tindakan manajemen laba dapat terjadi karena didasari oleh perilaku *opportunistic* dari manajer. Bagi perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya, perubahan tarif ini dapat dijadikan momen bagi manajemen perusahaan. Perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya akan merespon perubahan tarif pajak di Indonesia dengan melakukan manajemen laba (Subagyo dan Oktavia, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah penurunan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak.

*Insentif Pajak (Perencanaan Pajak dan Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih) dan Manajemen Laba*

Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah akan dimanfaatkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pada umumnya Wajib Pajak menginginkan beban pajak yang seminimal mungkin. Yin dan Cheng (2004, dalam Wijaya dan Martani, 2011) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan dapat meminimalisasi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan agar pajak terutang perusahaan semakin kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kewajiban pajak tangguhan timbul ketika terdapat beda waktu yang akan mengakibatkan penambahan penghasilan kena pajak di masa mendatang. Beda waktu timbul akibat perbedaan laba akuntansi dan laba kena pajak yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Yulianti (2005, dalam Wijaya dan Martani, 2011) menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan atau menangguhkan pengakuan beban (mempercepat beban atau menangguhkan pendapatan) untuk kepentingan akuntansi dibandingkan dengan kepentingan perpajakan perusahaan tersebut. Ketika kewajiban pajak tangguhan meningkat, hal ini akan menyebabkan perusahaan harus membayar beban pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin kecilnya kenaikan kewajiban pajak tangguhan berarti semakin besar manajemen laba yang telah dilakukan perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3: Kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

*Non Insentif Pajak (Earnings Pressure, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial) dan Manajemen Laba*

*Earnings Pressure* dengan Manajemen Laba

Yin dan Cheng (2004, dalam Wijaya dan Martani, 2011) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang labanya telah mencapai target atau minimal sama dengan laba tahun lalu, maka penurunan laba perusahaan dapat dikurangi dengan *earnings pressure*. *Earnings pressure* dilakukan dengan menurunkan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil (Yin dan Cheng, 2004; dalam Tiearya, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H4: *Earnings pressure* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Tingkat Utang dengan Manajemen Laba

Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar perusahaan. Untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, perusahaan harus mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan dapat meningkatkan utang perusahaan untuk mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas utang tersebut (Guenther, 1994; Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Wijaya dan Martani, 2011). Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar dan menyebabkan semakin menurunnya tingkat *discretionary accrual*. Dalam hal ini utang bertindak sebagai *tax shields* karena laba dapat berkurang akibat semakin besarnya beban bunga perusahaan sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan semakin kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H5: Tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan, biasanya ditunjukkan oleh besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Wijaya dan Martani (2011) perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Hal ini menyebabkan adanya pendapat bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan lebih mungkin perusahaan tersebut mengurangi laba dengan menggeser atau menunda labanya ke tahun setelah diefektifkannya penurunan tarif pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

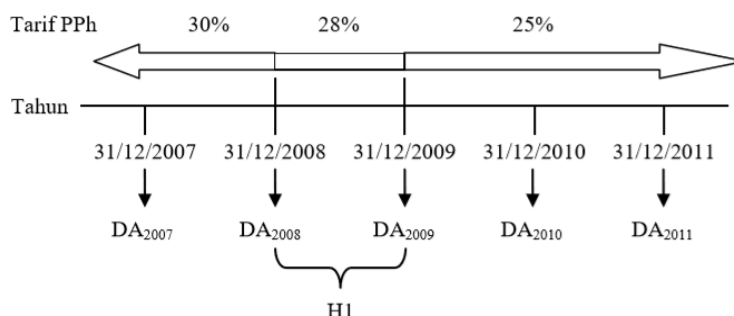
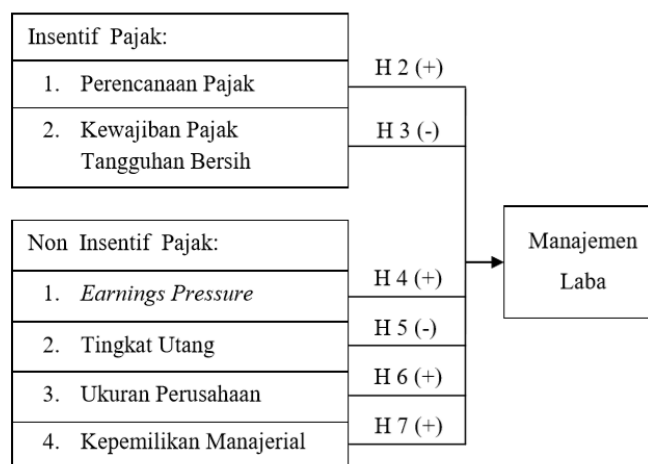
H6: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan tersebut. Ardilla (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham yang juga dirinya sendiri. Dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajer akan semakin merasa memiliki perusahaan. Manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambil, oleh karena itu manajer akan cenderung menginginkan perusahaan memiliki beban pajak yang kecil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut akan memiliki *discretionary accrual* yang negatif untuk memperoleh keuntungan pajak (Subagyo dan Oktavia, 2010). Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H7: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.



Rerangka Berpikir dan Model Analisis**Gambar 1. Rerangka Berpikir Hipotesis 1****Gambar 2. Rerangka Berpikir Hipotesis 2****METODE PENELITIAN**Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian komparatif, tujuannya untuk menguji dan menganalisis apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan membandingkan tingkat *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jenis penelitian lain dalam penelitian ini yaitu penelitian kausal, tujuannya untuk menguji apakah insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) dan non insentif pajak (*earnings pressure*, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap manajemen laba.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang diuji, yaitu variabel terikat atau variabel dependen dan variabel bebas atau variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manajemen laba. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif ataupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, *earnings pressure*, tingkat utang, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial. Berikut ini merupakan definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi atau tindakan nyata untuk mempengaruhi laba perusahaan dengan maksud tertentu (Scott, 2012:423). Penelitian ini menggunakan pendekatan *discretionary accrual* dalam mendeteksi manajemen laba. Perhitungan *discretionary accrual* menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995). Model Jones yang telah dimodifikasi ini dipilih karena pada model ini memperhitungkan kas pada operasi. Variabel arus kas operasi digunakan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim, karena arus kas operasi sangat menentukan besarnya laba yang akan diperoleh. Semakin besar kas operasi akan menunjukkan kesempatan perusahaan untuk memperoleh laba yang besar sehingga sangat dimungkinkan manajemen laba akan dilakukan (Tiearya, 2012). Perhitungan diawali dengan perhitungan total akrual, kemudian total akrual sebuah perusahaan dipisah menjadi *non discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* tersebut merupakan tingkat akrual yang tidak normal yang menunjukkan tingkat akrual hasil manajemen laba yang dilakukan manajer. Perhitungan *discretionary accrual* penelitian ini mengikuti perhitungan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow et al. (1995) yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung total akrual

$$TACC_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

$TACC_{it}$  = Total akrual perusahaan i pada tahun t

$N_{it}$  = Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

$CFO_{it}$  = Kas dari operasi (*cash from operation*) perusahaan perusahaan i pada tahun t

2. Menentukan koefisien dari regresi akrual

Tingkat akrual yang normal dapat dihitung dengan memisahkan *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual*. Langkah awal untuk menentukan *non discretionary accrual* yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$TA_{it-1}$  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REV_{it}$  = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$\Delta REC_{it}$  = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

$PPE_{it}$  = Aset tetap perusahaan i pada tahun t

$\epsilon_{it}$  = Error term perusahaan i pada tahun t

3. Menghitung *non discretionary accrual*

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, nilai *non discretionary accrual* dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \alpha_1(1/TA_{it-1}) + \beta_1((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

$Nda_{it}$  = *Non discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

4. Menghitung *discretionary accrual*

$$DA_{it} = TACC_{it}/TA_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

$DA_{it}$  = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

## b. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan tindakan yang ditempuh oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, hal ini dilakukan agar beban pajak dapat ditekan seefisien mungkin namun tetap memenuhi ketentuan umum perpajakan. Perencanaan pajak pada penelitian ini mengikuti penelitian yang dilakukan Yin dan Cheng (2004, dalam Wijaya dan Martani, 2011). Variabel perencanaan pajak diberi simbol TAXPLAN, yang dihitung dengan rumus:

## 1. Untuk tahun 2007

$$\text{TAXPLAN} = \frac{\sum_{2007}^{2006} (30\% \cdot \text{PTI} - \text{CTE}) : 2}{\text{TA}_{2007}}$$

## 2. Untuk tahun 2008

$$\text{TAXPLAN} = \frac{\sum_{2008}^{2007} (30\% \cdot \text{PTI} - \text{CTE}) : 2}{\text{TA}_{2008}}$$

## 3. Untuk tahun 2009

$$\text{TAXPLAN} = \frac{\sum_{2009}^{2008} (28\% \cdot \text{PTI} - \text{CTE}) : 2}{\text{TA}_{2009}}$$

## 4. Untuk tahun 2010

$$\text{TAXPLAN} = \frac{\sum_{2010}^{2009} (25\% \cdot \text{PTI} - \text{CTE}) : 2}{\text{TA}_{2010}}$$

## 5. Untuk tahun 2011

$$\text{TAXPLAN} = \frac{\sum_{2011}^{2010} (25\% \cdot \text{PTI} - \text{CTE}) : 2}{\text{TA}_{2011}}$$

Keterangan:

PTI = *Pre-tax income* (laba sebelum pajak)

CTE = *Current portion of total tax expense* (beban pajak kini)

TA = Total Aset

## c. Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih

Variabel kewajiban pajak tangguhan bersih dapat mendeteksi kemungkinan perusahaan melakukan praktik manajemen laba untuk menghindari kerugian (Yulianti, 2005; dalam Wijaya dan Martani, 2011). Kewajiban (aset) pajak tangguhan meningkat ketika perusahaan mempercepat pengakuan pendapatan dan menangguhkan pengakuan beban (mempercepat pengakuan beban dan menangguhkan pengakuan pendapatan). Ketika kewajiban pajak tangguhan meningkat berarti beban pajak perusahaan semakin besar akibat adanya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tahun tersebut. Variabel kewajiban pajak tangguhan bersih diberi simbol NDTL dengan mengikuti perhitungan pada penelitian Wijaya dan Martani (2011), yang dihitung dengan rumus:

$$\text{NDTL} = \frac{\text{Beban pajak tangguhan tahun berjalan}}{\text{Total aset awal tahun}}$$

d. *Earnings Pressure*

*Earnings pressure* didefinisikan sebagai tindakan untuk melakukan penurunan akrual yang bersifat menurunkan laba sehingga pajak yang akan dibayarkan menjadi kecil (Yin dan Cheng, 2004; dalam Tiearya, 2012). Jika laba perusahaan telah mencapai target atau minimal

sama dengan laba tahun lalu, penurunan laba dapat dilakukan dengan *earnings pressure*. Variabel *earnings pressure* diberi simbol EPRESS dengan mengikuti perhitungan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010), yang dihitung dengan rumus:

$$EPRESS = \frac{(\text{Laba tahun berjalan} - \text{Laba tahun lalu})}{\text{Total aset awal tahun}}$$

e. Tingkat Utang

Utang berbanding terbalik dengan laba, jika utang suatu perusahaan semakin besar maka laba akan semakin kecil karena semakin besarnya beban bunga. Perusahaan dapat meningkatkan utang perusahaan untuk mengurangi jumlah laba yang dihasilkan. Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar, sehingga laba dapat berkurang akibat semakin besarnya beban perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pengurangan pajak yang berhubungan dengan pembayaran bunga atas utang tersebut (Guenther, 1994; Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Wijaya dan Martani, 2011). Variabel tingkat utang diberi simbol DEBT dengan mengikuti perhitungan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010), yang dihitung dengan rumus:

$$DEBT = \frac{\text{Kewajiban jangka panjang tahun berjalan}}{\text{Total aset awal tahun}}$$

f. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian besar kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Watts dan Zimmerman (2003, dalam Wijaya dan Martani, 2011) perusahaan yang lebih besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang mengurangi laba bersih laporan keuangan, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik seperti yang mereka kehendaki misalnya dengan perencanaan pajak ataupun mengatur kegiatan mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal (Wijaya dan Martani, 2011). Variabel ukuran perusahaan diberi simbol SIZE dengan mengikuti perhitungan pada penelitian Wijaya dan Martani (2011), yang dihitung dengan rumus:

$$SIZE = \log (\text{nilai buku total aset})$$

g. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer perusahaan memiliki saham di perusahaan tersebut. Ardilla (2012) menyatakan bahwa adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham yang juga dirinya sendiri. Variabel kepemilikan manajerial diberi simbol MGTOWN, yang diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika tidak terdapat kepemilikan manajerial maka diberi angka 0, dan jika terdapat kepemilikan manajerial maka diberi angka 1.

#### Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Analisis data baru dapat dilakukan ketika seluruh data telah dikumpulkan dan harus sudah berupa data kuantitatif (angka). Data kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan menggunakan angka dan melakukan analisis data dengan menggunakan statistik. Data kuantitatif dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan auditan atau laporan tahunan yang dipublikasi oleh BEI dan buku *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan. Data diperoleh dari publikasi laporan keuangan auditan atau laporan tahunan oleh BEI dan buku ICMD. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan auditan atau laporan tahunan perusahaan manufaktur dari tahun 2007 hingga tahun 2011.



### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi dilakukan atas data yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan memperhatikan jenis data, ketersediaan data, cara memperoleh data, dan cara pengelolaan data terlebih dahulu. Dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri laporan keuangan auditan atau laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2007 hingga tahun 2011.

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2006 sampai dengan akhir tahun 2011. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang merupakan bagian dari metode *non probability sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di BEI selama periode 2006 hingga 2011.
2. Perusahaan yang laporan keuangan auditan atau laporan tahunannya dapat diakses selama periode 2007 hingga 2011.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan atau laporan tahunan yang disajikan dalam mata uang rupiah selama periode 2007 hingga 2011.

### Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Beda (T-Test)

Hipotesis H1 akan diuji setelah uji normalitas dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah data telah terdistribusi dengan normal. Apabila data terdistribusi dengan normal, peneliti akan menggunakan *paired sample t-test* (uji beda dua sampel berpasangan) sebagai uji beda. *Paired sample t-test* digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel pada saat sebelum dan sesudah dilakukan perlakuan tertentu (Ghozali, 2011:66). Apabila data tidak terdistribusi dengan normal, maka akan menggunakan uji Wilcoxon.

Dalam penelitian ini manajemen laba dapat dilihat pada nilai *discretionary accrual*. Ketika perusahaan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba maka akan terdapat perbedaan *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan Badan 2008. Tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah perubahan tarif pajak akan lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak. Pada penelitian ini tingkat signifikan yang ditetapkan adalah 5% (lima persen) ( $\alpha = 0,05$ ). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2008-2009  $< 0,05$ , maka H1 diterima berarti tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah penurunan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak yang artinya perusahaan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.
2. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2008-2009  $> 0,05$ , maka H1 ditolak berarti tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah penurunan tarif pajak tidak ada perbedaan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak yang artinya perusahaan tidak merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.

Peneliti kemudian melakukan pengujian lebih dalam. Dimana pada penelitian ini yang menjadi periode pengamatan selain 2008 dan 2009 adalah tahun 2007, 2010, dan 2011. Tahun 2007 dipilih karena untuk menguji apakah sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba. Tahun 2010 dipilih karena pada tahun tersebut diefektifkan pula tarif pajak yang lebih rendah, dan untuk tahun 2011 dipilih karena untuk menguji apakah perusahaan sampel tetap melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010. Pada penelitian ini tingkat signifikan yang ditetapkan adalah 5% (lima persen) ( $\alpha = 0,05$ ). Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2007-2008  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan telah melakukan manajemen laba.
2. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2007-2008  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan tidak melakukan manajemen laba.
3. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2009-2010  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan perusahaan merespon penurunan tarif yang lebih rendah dengan melakukan manajemen laba.
4. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2009-2010  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan perusahaan tidak merespon penurunan tarif yang lebih rendah dengan melakukan manajemen laba.
5. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2010-2011  $< 0,05$ , maka dapat disimpulkan perusahaan melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku efektif 2009 dan 2010 dengan melakukan manajemen laba.
6. Jika Sig. (2-tailed) pada uji beda tahun 2010-2011  $> 0,05$ , maka dapat disimpulkan perusahaan tidak melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku efektif 2009 dan 2010 dengan melakukan manajemen laba.

b. Regresi Linear Berganda

Hipotesis H2 sampai dengan H7 akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2007; dalam Tiearya, 2012). Dalam penelitian ini model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = a + b_1TAXPLAN_{it} + b_2NDTL_{it} + b_3EPRESS_{it} + b_4DEBT_{it} + b_5SIZE_{it} + b_6MGTOWN_{it} + e$$

Keterangan:

DA	=	<i>Discretionary accrual</i>
TAXPLAN	=	Perencanaan pajak
NDTL	=	Kewajiban pajak tangguhan bersih
EPRESS	=	<i>Earnings preassure</i>
DEBT	=	Tingkat utang
SIZE	=	Ukuran perusahaan
MGTOWN	=	Kepemilikan manajerial
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi
e	=	error

Setelah uji asumsi klasik telah dilakukan, analisis regresi linear berganda dilakukan melalui uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F (uji kelayakan model), dan uji statistik t (uji signifikan parameter individual).

1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Nilai koefisien korelasi ( $R^2$ ) ini berkisar antara  $0 < R^2 < 1$ . Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:97). Kelemahan mendasar penggunaan  $R^2$  adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  akan meningkat, tidak peduli apakah variabel

independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dikarenakan variabel independen dalam penelitian ini lebih dari dua, maka akan menggunakan *Adjusted R<sup>2</sup>* sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dan mengetahui kesesuaian variabel-variabel yang dimasukkan dalam model dengan data (Moe, 2011). Dengan menggunakan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar 0,05, maka dasar analisis uji statistik F adalah apabila *p-value* lebih tinggi daripada tingkat signifikansi maka variabel independen tidak tepat mempengaruhi variabel dependen artinya model regresi tidak layak atau tidak sesuai. Sebaliknya, jika *p-value* lebih rendah dari tingkat signifikansi maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen sudah tepat mempengaruhi variabel dependen artinya model regresi telah layak atau sesuai.

3. Uji Statistik t

Uji statistik t ini digunakan untuk uji hipotesis. Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan adalah 0,05. Apabila *p-value* lebih tinggi daripada tingkat signifikansi maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika *p-value* lebih rendah dari tingkat signifikansi maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI selama periode 2006 hingga 2011. Berdasarkan data yang diperoleh dari buku ICMD pada tahun 2011 terdapat 149 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel untuk Pengujian H1**

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	149
Tidak memenuhi kriteria:	
a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut selama periode 2006 hingga 2011	(14)
b. Perusahaan yang laporan keuangan auditan dapat diakses selama periode 2007 hingga 2011.	(56)
c. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah selama periode 2007 hingga 2011	(3)
Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	76

Sumber: Data diolah

Dari keseluruhan jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2006 hingga 2011, terdapat 76 perusahaan manufaktur yang setiap tahunnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Jumlah observasi (*n*) dalam penelitian ini adalah 76 perusahaan manufaktur

yang terdaftar pada BEI untuk pengujian hipotesis H1.

Pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan analisis regresi linear berganda terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik, salah satunya uji normalitas. Pada Lampiran 6 dapat di lihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Karena data tidak terdistribusi dengan normal maka untuk menormalkan distribusi data dapat dilakukan dengan mendeteksi adanya data *outlier*. *Outlier* merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari sampel-sampel lainnya (Ghozali, 2011:41). Deteksi adanya data *outlier* dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu dengan cara mengkonversi nilai data kedalam skor *standardized* atau biasa disebut *z-score*. *Zscore* merupakan suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data. Apabila nilai *z-score* di atas 1,97 atau di bawah -1,97 maka sampel tersebut dinyatakan sebagai data *outlier*.

**Tabel 2. Kriteria Pemelihan Sampel untuk Pengujian H2-H7**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian	76
2	Sampel <i>outlier</i>	(18)
	Sampel yang digunakan untuk pengujian H2-H7	58

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Dari keseluruhan jumlah observasi (n) yang digunakan dalam pengujian hipotesis H1, terdapat 18 perusahaan yang dinyatakan sebagai data *outlier*. Oleh karena itu, jumlah observasi (n) yang digunakan untuk pengujian hipotesis H2 sampai H7 adalah  $5 \times 58 = 290$  perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI.

#### Deskripsi Data

Penelitian dilakukan pada periode 2007 hingga 2011 dengan sampel 76 perusahaan manufaktur. Setelah diketahui nilai dari *discretionary accrual* pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011, maka dapat diketahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, serta standar deviasi setiap tahun dari 76 perusahaan tersebut pada analisis statistik deskriptif untuk pengujian hipotesis H1. Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif untuk *discretionary accrual* tiap tahunnya.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif**

DA tahun	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
2007	76	-0,66737	0,18753	-0,20622	0,15148
2008	76	-0,69459	0,69618	-0,03166	0,18347
2009	76	-0,18871	0,27850	-0,03023	0,08645
2010	76	-0,48823	0,75904	0,00617	0,15254
2011	76	-0,77569	0,86811	0,10372	0,17837

Sumber: Data diolah

Dari tabel statistik deskriptif pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel DA tahun 2007 memiliki nilai minimum sebesar -0,66737 yang merupakan nilai dari PT Betonjaya Manunggal Tbk. (BTON) dan nilai maksimum sebesar 0,18753 yang merupakan nilai dari PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI). DA tahun 2007 memiliki rata-rata sebesar -0,20622 dengan standar deviasi sebesar 0,15148. DA tahun 2008 memiliki nilai minimum sebesar -0,69459 yang merupakan nilai dari PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. (POLY) dan nilai maksimum sebesar 0,69618 yang merupakan nilai dari PT Ekadharm



International Tbk. (EKAD). DA tahun 2008 memiliki rata-rata sebesar -0,03166 dengan standar deviasi sebesar 0,18347. DA tahun 2009 memiliki nilai minimum sebesar -0,18871 yang merupakan nilai dari PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) dan nilai maksimum sebesar 0,27850 yang merupakan nilai dari PT Prasadha Aneka Niaga Tbk. (PSDN). DA tahun 2009 memiliki rata-rata sebesar -0,03023 dengan standar deviasi sebesar 0,08645. DA tahun 2010 memiliki nilai minimum sebesar -0,48823 yang merupakan nilai dari PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. (POLY) dan nilai maksimum sebesar 0,75904 yang merupakan nilai dari PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA). DA tahun 2010 memiliki rata-rata sebesar 0,00617 dengan standar deviasi sebesar 0,15254. DA tahun 2011 memiliki nilai minimum sebesar -0,77569 yang merupakan nilai dari PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. (POLY) dan nilai maksimum sebesar 0,86811 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). DA tahun 2011 memiliki rata-rata sebesar 0,10372 dengan standar deviasi sebesar 0,17837. Rata-rata DA setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pola manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Pada tahun 2007 rata-rata DA memiliki nilai negatif yang berarti pada tahun 2007 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Tahun 2008 dan 2009 juga memiliki nilai rata-rata yang negatif tetapi tidak sebesar pada tahun 2007. Pada tahun 2010 rata-rata DA memiliki nilai positif yang berarti pada tahun 2010 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Tahun 2011 memiliki nilai rata-rata DA yang lebih besar dari tahun 2010, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menaikkan labanya lebih besar daripada tahun 2010.

Untuk pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan analisis statistik deskriptif dalam 5 tahun secara bersama-sama dengan sampel 58 perusahaan manufaktur setiap tahunnya. Tabel 4 akan menyajikan statistik deskriptif untuk *discretionary accrual* (DA), perencanaan pajak (TAXPLAN), kewajiban pajak tangguhan bersih (NDTL), earnings pressure (EPRESS), tingkat hutang (DEBT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGTOWN) selama 5 tahun.

**Tabel 4. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
DA	290	-0,37814	0,86811	-0,02446	0,13573
TAXPLAN	290	-0,09671	0,33050	-0,00287	0,02402
NDTL	290	-0,14946	0,12883	-0,00113	0,01743
EPRESS	290	-0,23989	0,75867	0,02082	0,08219
DEBT	290	0,00009	2,43955	0,19939	0,33507
SIZE	290	7,07068	11,18617	9,07518	0,71088

Sumber: Data diolah

Dari tabel statistik deskriptif pada tabel 4 dapat diketahui bahwa variabel DA memiliki nilai minimum sebesar -0,37814 yang merupakan nilai dari PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk. (SAIP) pada tahun 2007 dan nilai maksimum sebesar 0,86811 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW) pada tahun 2011. Rata-rata DA sebesar -0,02446 dengan standar deviasi sebesar 0,13573. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kemungkinan terjadinya manajemen laba, rata-rata pola manajemen laba yang dilakukan adalah penurunan laba. Pada variabel TAXPLAN memiliki nilai minimum -0,09671 yang merupakan nilai dari PT. Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum 0,3305 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). Rata-rata TAXPLAN sebesar -0,00287 dengan standar deviasi sebesar 0,02402. Variabel NDTL memiliki nilai minimum -0,14946 yang merupakan nilai dari PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) dan nilai maksimum 0,12883 yang merupakan nilai dari PT Argo Pantes Tbk. (ARGO). Rata-rata NDTL sebesar -0,00113 dengan standar deviasi 0,01743.

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel EPRESS memiliki nilai minimum sebesar -0,23989 yang merupakan nilai dari PT Surabaya Agung Industry Pulp Tbk. (SAIP) dan nilai maksimum sebe-

sar 0,75867 yang merupakan nilai dari PT Karwell Indonesia Tbk. (KARW). Rata-rata EPRESS sebesar 0,02082 dengan standar deviasi 0,08219. Variabel DEBT memiliki nilai minimum sebesar 0,00009 yang merupakan nilai dari PT Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum sebesar 2,43955 yang merupakan nilai dari PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JPRS). Rata-rata DEBT sebesar 0,19939 dengan standar deviasi 0,33507. Variabel SIZE memiliki nilai minimum sebesar 7,07068 yang merupakan nilai dari PT Aneka Kemasindo Utama Tbk. (AKKU) dan nilai maksimum sebesar 11,18617 yang merupakan nilai dari PT Astra International Tbk. (ASII). Rata-rata SIZE sebesar 9,07518 dengan standar deviasi 0,71088.

**Tabel 5. Statistik Deskriptif Kepemilikan Manajerial**

MGTOWN	Frekuensi
Tidak terdapat kepemilikan manajerial	209 (72,1%)
Terdapat kepemilikan manajerial	81 (27,9%)
Total	290 (100%)

Sumber: Data diolah

Variabel MGTOWN menggunakan variabel dummy, apabila tidak terdapat kepemilikan manajerial maka diberi angka 0 dan apabila terdapat kepemilikan manajerial maka diberi angka 1. Pada Tabel 4.5. di atas dapat dilihat terdapat 209 perusahaan yang manajer perusahaannya tidak memiliki saham di perusahaan tersebut, sedangkan 81 perusahaan lainnya terdapat saham yang dimiliki oleh manajer perusahaannya.

#### Analisis Data

##### Hasil Uji Beda (T-Test) dan Uji Wilcoxon

Ketika manajemen laba dilakukan perusahaan, maka akan terdapat perbedaan yang signifikan antara *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak penghasilan badan 2008. Pengujian hipotesis H1 diperuntukkan untuk uji beda 2008-2009 yang akan dilakukan dengan uji Wilcoxon, hal ini dikarenakan DA tahun 2009 tidak terdistribusi dengan normal. Tabel 8 di bawah menunjukkan uji Wilcoxon untuk periode 2008-2009.

**Tabel 6. Hasil Uji Wilcoxon 2008-2009**

	<i>Negative</i> <i>Ranks</i>	<i>Positive</i> <i>Ranks</i>	<i>Asymp. Sig.</i> (2-tailed)	Keterangan
DA 2008- DA 2009	39 <sup>a</sup>	37 <sup>b</sup>	0,733	Tidak ada perbedaan

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 6 menunjukkan bahwa secara statistik terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penurunan tarif pajak, hal ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,733 yang lebih besar dari 0,05. Secara statistik H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon manajemen dengan melakukan manajemen laba. Selain melakukan uji beda pada periode 2008 dan 2009, peneliti melakukan pengujian lebih dalam yaitu akan menguji periode 2007-2008, 2009-2010, dan 2010-2011. Dikarenakan DA tahun 2007 dan 2008 terdistribusi dengan normal, maka pengujian akan menggunakan uji beda *paired sample t-test*. Untuk periode 2009-2010 dan 2010-2011 akan menggunakan uji Wilcoxon karena pada tahun 2009 dan 2011 data tidak terdistribusi dengan normal.

Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba.

**Tabel 7. Hasil Uji Beda (T-Test) 2007-2008**

	Rata-rata	N	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pair 1 DA 2007- DA 2008	-0,2062 -0,0317	76	0,000	Ada perbedaan

Sumber: Data diolah

**Tabel 8. Hasil Uji Wilcoxon 2009-2010 dan 2010-2011**

	Negative Ranks	Positive Ranks	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
DA 2009- DA 2010	31 <sup>a</sup>	45 <sup>b</sup>	0,089	Tidak ada perbedaan
DA 2010- DA 2011	14 <sup>c</sup>	62 <sup>d</sup>	0,000	Ada perbedaan

Sumber: Data diolah

Pada Tabel 8 menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan yang signifikan karena tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,089 yang lebih besar dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak merespon penurunan tarif pajak yang lebih rendah daripada 2009 dengan melakukan manajemen laba. Pada Tabel 9. di atas juga menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) yang memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

#### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis H2 sampai H7 akan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. Analisis Regresi linear berganda dilakukan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini merupakan hasil analisis regresi linear berganda yang meliputi:

##### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pada Tabel 11 di bawah dapat dilihat nilai Adjusted  $R^2$  sebesar 0,215, hal ini berarti kemampuan variabel TAXPLAN, NDTL, EPRESS, DEBT, SIZE, dan MGTOWN dalam menjelaskan variabel DA terbatas hanya mampu menjelaskan variasi sebesar 21,5%, sedangkan sisanya sebesar 78,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ke enam variabel independen yang diteliti oleh peneliti.

**Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,231	0,215	0,12024

Sumber: Data diolah

b. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan dan mengetahui kesesuaian variabel-variabel yang dimasukkan dalam model dengan data. Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat nilai F hitung sebesar 14,207 dengan Sig. 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti bahwa variabel TAXPLAN, NDTL, EPRESS, DEBT, SIZE, dan MGTOWN sudah tepat memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel DA, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah layak dan sesuai.

**Tabel 10. Hasil Uji Statistik F**

Model	df	F	Sig.
Regression	6	14,207	0,000
Residual	283		
Total	289		

Sumber: Data diolah

c. Uji Statistik t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat di Tabel 11.

**Tabel 11. Hasil Uji Statistik t**

Model	Koefisien	t	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,025			
TAXPLAN	1,783	5,354	0,000	Signifikan
NDTL	-0,894	-2,148	0,033	Signifikan
EPRESS	0,301	3,074	0,002	Signifikan
DEBT	-0,070	-3,275	0,001	Signifikan
SIZE	-0,005	-0,543	0,587	Tidak Signifikan
MGTOWN	0,042	2,604	0,010	Signifikan

Sumber: Data diolah

Tabel 11 akan menunjukkan signifikan atau tidaknya pengaruh dari variabel TAXPLAN, NDTL, EPRESS, DEBT, SIZE, dan MGTOWN terhadap DA secara individual dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

1. TAXPLAN berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.
2. NDTL berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
3. EPRESS berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,002 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.
4. DEBT berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
5. SIZE tidak berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,587 dan berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif.
6. MGTOWN berpengaruh signifikan terhadap DA karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,010 dan berpengaruh secara positif karena nilai koefisiennya positif.



Setelah melakukan analisis regresi linear berganda, akan menghasilkan persamaan matematis sebagai berikut:

$$DA = 0,025 + 1,783 \text{ TAXPLAN} - 0,894 \text{ NDTL} + 0,301 \text{ EPRESS} - 0,070 \text{ DEBT} - 0,005 \text{ SIZE} + 0,042 \text{ MGTOWN} + e$$

### Pembahasan

#### Hasil Pengujian Hipotesis H1

H1 yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Tingkat *discretionary accrual* pada periode sesudah penurunan tarif pajak lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum penurunan tarif pajak”. Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa secara statistik terlihat tidak ada perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penurunan tarif pajak, hal ini dapat dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,733 yang lebih besar dari 0,05. Secara statistik H1 ditolak, namun jika dilihat dari rata-rata DA tahun 2008 dan 2009 pada Tabel 4 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba pada 2008, hal ini dapat dilihat pada rata-rata DA tahun 2008 sebesar -0,03166 yang lebih rendah daripada 2009 sebesar -0,03023 dengan kata lain terjadi usaha penurunan laba yang dilakukan perusahaan pada tahun 2008 karena adanya penurunan tarif pajak yang berlaku efektif tahun 2009. Pada Tabel 8 juga dapat dilihat bahwa negative ranks (39 perusahaan) lebih banyak jumlahnya daripada positive ranks (37 perusahaan), hal ini menunjukkan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Hal-hal tersebut menunjukkan secara absolut rata-rata DA tahun 2008 lebih rendah daripada 2009 dan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba, tetapi secara statistik H1 tolak karena tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon manajemen dengan melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Hidayati dan Zulaikha (2003) bahwa perubahan Undang-Undang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan tahun 2000 tidak direspon oleh Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melakukan manajemen laba melalui rekayasa *discretionary accrual* guna meminimalkan beban pajak perusahaan. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) bahwa terdapat perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan. Subagyo dan Oktavia (2010) membagi menjadi dua kelompok yakni perusahaan yang memperoleh laba dan mengalami kerugian. Perusahaan yang mengalami kerugian tidak melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan, sedangkan pada perusahaan yang memperoleh laba perusahaan merespon perubahan tarif pajak penghasilan badan dengan melakukan manajemen laba.

Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Wijaya dan Martani (2011), penelitian Wijaya dan Martani (2011) memberikan bukti bahwa baik perusahaan yang memperoleh laba atau yang mengalami kerugian sama-sama melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak penghasilan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak mengkonfirmasi penelitian Fitriyani, dkk. (2012) karena penelitian mereka memberikan bukti bahwa perusahaan merespon perubahan tarif pajak penghasilan dengan cara melakukan manajemen laba.

Peneliti kemudian melakukan pengujian lebih dalam, selain melakukan pengujian pada periode 2008 dan 2009 penelitian ini juga akan menguji periode 2007-2008, 2009-2010, dan 2010-2011. Hasil uji beda (t-test) pada Tabel 8 menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan DA yang signifikan, hal ini dikarenakan Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Rata-rata DA tahun 2007 sebesar -0,2062 lebih kecil daripada DA tahun 2008 sebesar -0,0317 artinya pada tahun 2007 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba.

Hasil uji Wilcoxon pada Tabel 10 menunjukkan bahwa secara statistik tidak ada perbedaan DA 2009 dengan 2010 yang signifikan karena tingkat Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai 0,089 yang lebih besar dari 0,05. Jika dilihat dari rata-rata DA tahun 2009 dan 2010 pada Tabel 4 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba pada 2009 dan menaikkan laba pada 2010, hal ini dapat dilihat pada rata-rata DA tahun 2009 sebesar -0,03023 yang lebih rendah daripada 2010

sebesar 0,00617. Pada Tabel 9 juga dapat dilihat bahwa *negative ranks* (31 perusahaan) lebih sedikit jumlahnya daripada *positive ranks* (45 perusahaan), hal ini menunjukkan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Secara statistik dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak merespon penurunan tarif pajak yang lebih rendah pada 2010 dengan melakukan manajemen laba.

Pada Tabel 9 juga menunjukkan bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan, hal ini dilihat dari Asymp. Sig. (2-tailed) yang memiliki nilai 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Jika dilihat dari rata-rata DA tahun 2010 dan 2011 pada Tabel 4 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba pada 2011, hal ini dapat dilihat pada rata-rata DA tahun 2010 sebesar 0,00617 yang lebih rendah daripada 2011 sebesar 0,10372. Pada Tabel 8. juga dapat dilihat bahwa *negative ranks* (14 perusahaan) lebih sedikit jumlahnya daripada *positive ranks* (62 perusahaan), hal ini menunjukkan lebih banyak perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel melakukan manajemen laba setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

#### Hasil Pengujian Hipotesis H2 Sampai H7

##### a. Perencanaan Pajak dengan Manajemen Laba

H2 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu "Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba". H2 diterima dan terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan Subagyo dan Oktavia (2010) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap manajemen laba ketika perusahaan yang memperoleh laba, sedangkan ketika perusahaan mengalami rugi perencanaan pajak berpengaruh tidak signifikan dan bersifat positif. Pengaruh positif ini berarti semakin besar perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan maka akan semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari *tax shields* dan dapat meminimalisasi beban pajak perusahaan (Yin dan Cheng, 2004; dalam Wijaya dan Martani, 2011).

##### b. Kewajiban Pajak Tangguhan Bersih dengan Manajemen Laba

H3 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu "Kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh negatif terhadap manajemen laba". H3 diterima dan terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan Wijaya dan Martani (2011) yang menyatakan bahwa kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap manajemen laba ketika perusahaan yang memperoleh laba, sedangkan ketika perusahaan mengalami rugi kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh signifikan dan bersifat negatif. Pengaruh negatif ini berarti semakin kecil kenaikan kewajiban pajak tangguhan maka semakin besar manajemen laba yang telah dilakukan perusahaan. Disini perusahaan akan cenderung meminimalkan kenaikan kewajiban pajak tangguhan dengan cara melakukan manajemen laba.

##### c. Earnings Pressure dengan Manajemen Laba

H4 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu "Earnings pressure berpengaruh positif terhadap manajemen laba". H4 diterima dan terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa *earnings pressure* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) bahwa *earnings pressure* berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap manajemen laba. Pengaruh positif ini berarti jika semakin perusahaan melakukan *earnings pressure* maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ketika laba perusahaan telah mencapai target atau minimal sama dengan laba tahun lalu, penurunan laba perusahaan dapat dikurangi dengan *earnings pressure*, oleh karena itu semakin perusahaan melakukan *earnings pressure* maka perusahaan semakin melakukan manajemen laba.

## d. Tingkat Utang dengan Manajemen Laba

H5 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “tingkat utang berpengaruh negatif terhadap manajemen laba”. H5 diterima dan terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa tingkat utang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010). Perbedaan terdapat pada besarnya pengaruh, pada penelitian ini tingkat utang berpengaruh secara signifikan pada manajemen laba sedangkan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) tingkat utang tidak berpengaruh secara signifikan tetapi sama-sama bersifat negatif terhadap manajemen laba. Pengaruh negatif ini berarti semakin besar tingkat utang maka semakin menurun tingkat *discretionary accrual*. Dengan meningkatkan utang, maka beban bunga yang harus dibayar semakin besar, dalam hal ini utang bertindak sebagai *tax shields* karena beban pajak perusahaan akan semakin kecil akibat dari menurunnya laba perusahaan.

## e. Ukuran Perusahaan dengan Manajemen Laba

H6 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba”. H6 ditolak dan tidak terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba namun memiliki sifat negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan sifat yang diajukan pada hipotesis atau pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010). Hal ini dapat disebabkan karena semakin besar perusahaan maka semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut harus melaporkan kondisi perusahaan lebih akurat. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung tidak akan merespon perubahan tarif pajak dengan melakukan manajemen laba.

## f. Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen Laba

H7 yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba”. H7 diterima dan terbukti karena berdasarkan pengujian statistik terhadap persamaan regresi linier berganda bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Subagyo dan Oktavia (2010). Perbedaan terdapat pada besarnya pengaruh, pada penelitian ini kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan pada manajemen laba sedangkan pada penelitian Subagyo dan Oktavia (2010) kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan tetapi sama-sama bersifat positif terhadap manajemen laba. Pengaruh positif ini berarti dengan adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan melakukan manajemen laba, hal ini dikarenakan pemilik cenderung menginginkan perusahaan memiliki beban pajak yang kecil.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia tidak direspon manajemen dengan melakukan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan yang signifikan *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2007 perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola penurunan laba. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan yang signifikan *discretionary accrual* pada tahun 2007 dan 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya perubahan UU PPh perusahaan sampel telah melakukan manajemen laba pada tahun 2007. Pemberlakuan tarif yang lebih rendah pada tahun 2010 tidak direspon oleh perusahaan sampel untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan yang signifikan *discretionary accrual* pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011 perusahaan sampel melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan yang signifikan *discretionary accrual* pada tahun 2010 dan 2011 sehingga

dapat disimpulkan bahwa setelah adanya perubahan UU PPh 2008 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010 perusahaan sampel melakukan manajemen laba.

Dapat disimpulkan pula bahwa insentif pajak (perencanaan pajak dan kewajiban pajak tangguhan bersih) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Perencanaan pajak berpengaruh secara positif terhadap manajemen laba, sedangkan kewajiban pajak tangguhan bersih berpengaruh secara negatif pada manajemen laba. Non insentif pajak (*earnings pressure*, tingkat utang, dan kepemilikan manajerial) juga berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. *Earnings pressure* dan kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif, sedangkan tingkat utang berpengaruh secara negatif. Untuk ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh secara negatif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan pertama yaitu generalisasi hasil penelitian ini hanya pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Keterbatasan kedua adalah berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dapat diartikan kemampuan perencanaan pajak, kewajiban pajak tangguhan bersih, *earnings pressure*, tingkat utang, dan kepemilikan manajerial dalam menjelaskan *discretionary accrual* terbatas, hanya mampu menjelaskan variasi sebesar 21,5%, sehingga variabel independen yang dipakai kurang tepat karena sebesar 78,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar ke enam variabel independen yang diteliti peneliti. Dari keterbatasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya. Saran pertama yaitu agar penelitian selanjutnya dapat lebih memperluas sampel perusahaan tidak hanya perusahaan manufaktur saja. Saran kedua yaitu untuk menambahkan variabel independen lain yang mampu menjelaskan *discretionary accrual* secara tepat atau mengganti proksi lain untuk mendapatkan variabel independen yang tepat.

## REFERENCES

- Ardilla, T.L., 2012, Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 dan Pengaruh Insentif Pajak-Non Pajak terhadap Manajemen Laba, Semarang: Universitas Diponegoro
- Ariani, D., 2010, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan yang Bergerak di Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Fitriyani, D., R. Maiyarni, dan M. Gowon, 2012, Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*, Vol. 14, No. 1, Januari-Juni 2012: 55-60, ISSN 0852-8349.
- Ghozali, I., 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Edisi Kelima, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayati, S.M., dan Zulaikha, 2003, Analisis Perilaku Earning Management: Motivasi Minimalisasi Income Tax, *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009), Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2012, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.
- Isnanta, R., 2008, Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Melinda, E., 2010, Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Pertumbuhan Laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi ang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Moe, 2011, Uji F, Uji T, R2, (<http://moe-nier.blogspot.com>, diunduh 7 Desember 2011).
- Rahmawati, A.R. Suprpti, dan S. Seventi, 2010, Model Strategi Manajemen Laba pada Perusahaan Publik di Bursa Efek Indonesia; Suatu Pemeriksaan Pergeseran Klasifikasi serta Dampaknya terhadap Kinerja Saham, Pemelihan Metode Akuntansi, dan Pengaturan Waktu Transaksi, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 14, No. 1, 2010.
- Rahmawati, F., 2010, Pengaruh Karakteristik Dewan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance terhadap Konservatisme Akuntansi di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sari, D.K., dan D. Martani, 2010, Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance, dan Tindakan Pajak Agresif, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Sari, S.R.K., dan Bandi, 2010, Praktik Manajemen Laba Terkait Peringkat Obligasi, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.

- Scott, W.R., 2012, *Financial Accounting Theory*, 6th ed., New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Santoso, S., 2010, *Statistik Parametrik*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suandy, E., 2008, *Perencanaan Pajak*, Edisi Keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, dan Oktavia, 2010, Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.
- Sunarto, 2009, Teori Keagenan dan Manajemen Laba, *Kajian Akuntansi*, Vol. 1, No. 1, Februari 2009: 13-28, ISSN 1979-4886.
- Tiearya, I.R., 2012, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan 2008 di Indonesia, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D.T., dan Masodah, 2011, Pengaruh Asimetri Informasi, Struktur Kepemilikan, Manajerial dan Leverage terhadap Praktik Manajemen Laba dalam Industri Perbankan di Indonesia, Depok: Universitas Gunadarma.
- Wijaya, M., dan D. Martani, 2011, Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menanggapi Penurunan Tarif Pajak Sesuai UU No. 36 Tahun 2008, *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Wulandari, dan R. Ayu, 2010, Pengaruh Sistem Hukum terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi: Studi Perbandingan Inggris dan Perancis, *Simposium Nasional Akuntansi XIII*, Purwokerto.